



**PERJANJIAN KERJA SAMA**  
**ANTARA**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
**UNIVERSITAS NEGERI MALANG**  
**DAN**  
**KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI**  
**JAWA TIMUR II**  
**TENTANG**  
**KERJA SAMA PEMBENTUKAN INKUBATOR UMKM BERORIENTASI**  
**EKSPOR MELALUI RISET, PUBLIKASI DAN PENGEMBANGAN KAPASITAS**  
**DALAM BIDANG EKONOMI DAN PERDAGANGAN**

NOMOR: 16.10.1/UN32.4/KS/2024  
NOMOR: PRJ-2/WBC.12/2024

Pada hari ini, Rabu tanggal 16 bulan Oktober tahun 2024, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Hadi Sumarsono, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang**, berdasarkan Surat Keputusan Rektor UM Nomor 4.11.9/UN32/KP/2022 Tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang Periode 2018-2022 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang Periode 2022-2027, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Agus Sudarmadi, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur II**, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 492/KMK.01/2022 tentang Mutasi Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Keuangan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang, berkedudukan di Jalan Surabaya Nomor 2 Kota Malang, Jawa Timur yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

Paraf Pihak Kesatu  
Paraf Pihak Kedua


**PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi Negeri milik Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden No. 93 Tahun 1999 tanggal 4 Agustus 1999 yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada Masyarakat dan bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Negeri Malang.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah instansi di bawah Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dalam bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan, dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. bahwa masing-masing **PIHAK** memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam perjanjian kerjasama secara kelembagaan yang saling menguntungkan tentang Kerja Sama Pembentukan Inkubator UMKM Berorientasi Ekspor Melalui Riset, Publikasi dan Pengembangan Kapasitas Dalam Bidang Ekonomi dan Perdagangan.
- d. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama Pembentukan Inkubator UMKM Berorientasi Ekspor Melalui Riset, Publikasi dan Pengembangan Kapasitas Dalam Bidang Ekonomi dan Perdagangan (selanjutnya disebut **Perjanjian**), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

## **PASAL 1 KETENTUAN UMUM**

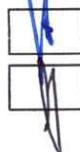
Dalam **Perjanjian** ini yang dimaksud dengan:

1. *Joint research* adalah pelaksanaan kajian oleh Universitas Negeri Malang mengenai program pembinaan dan pemberdayaan UMKM berorientasi ekspor terkait dengan topik-topik dalam bidang ekonomi dan perdagangan yang ditujukan untuk memperkaya analisis dan menghasilkan karya ilmiah yang dapat diterapkan di industri, serta dapat dipublikasikan di jurnal ilmiah, atau media lain yang bereputasi baik.
2. *Research Data & Information Sharing* adalah aktivitas tukar menukar data dan informasi yang berkaitan dengan sektor ekonomi dan perdagangan untuk pengembangan dan pemberdayaan UMKM berorientasi ekspor.
3. *Research Event* adalah agenda diseminasi, publikasi, sosialisasi, dan/atau literasi yang berkaitan dengan riset dan keilmuan di bidang ekonomi dan perdagangan dalam rangka pengembangan dan pemberdayaan UMKM berorientasi ekspor.

## **PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN**

**Perjanjian** ini disusun dengan tujuan untuk meningkatkan kerjasama dalam bidang riset, publikasi, edukasi dan literasi, Kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) serta pengembangan ekonomi dan perdagangan sebagai upaya pengembangan dan pemberdayaan UMKM berorientasi ekspor.

Paraf Pihak Kesatu  
Paraf Pihak Kedua



### **PASAL 3 RUANG LINGKUP**

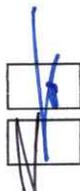
Ruang lingkup **Perjanjian** ini mencakup :

1. *Joint research* dan publikasi dalam topik ekonomi dan perdagangan khususnya dalam bidang pengembangan dan pemberdayaan UMKM berorientasi ekspor.
2. *Research Data & Information Sharing* berkaitan dengan upaya pengembangan dan pemberdayaan UMKM berorientasi ekspor.
3. *Research Event* penyelenggaraan kegiatan edukasi dan literasi dalam bidang pengembangan dan pemberdayaan UMKM berorientasi ekspor pada program KLINIK EKSPOR pada unit kerja **PIHAK KEDUA**.
4. Penyelenggaraan program MBKM (Merdeka Belajar – Kampus Merdeka) pada unit kerja **PIHAK PERTAMA**.
5. Kegiatan ini mencakup program studi S1 Ekonomi Pembangunan, S1 Pendidikan Ekonomi, S1 Manajemen, S1 Pendidikan Tata Niaga, S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran, S1 Akuntansi, S1 Pendidikan Akuntansi, S2 Ilmu Ekonomi, S2 Pendidikan Ekonomi, S2 Manajemen, S2 Pendidikan Bisnis dan Manajemen, S2 Akuntansi, S3 Pendidikan Ekonomi, dan S3 Ilmu Manajemen.

### **PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN**

1. **PIHAK KESATU** berhak untuk:
  - a. memanfaatkan pelaksanaan kerjasama sesuai kebutuhan dan kepentingan **PIHAK KESATU**;
  - b. menyampaikan rekomendasi mahasiswa dan dosen yang akan dikirimkan terkait program yang diadakan bersama dengan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang; dan
  - c. menyematkan logo Universitas Negeri Malang dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan bersama.
2. **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk:
  - a. memfasilitasi pelaksanaan kerjasama yang terkait;
  - b. melakukan koordinasi kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan kewenangannya;
  - c. berperan serta dalam menyelesaikan skema pelaksanaan kerja sama; dan
  - d. menjaga nama baik dan kepentingan **PIHAK KEDUA**.
3. **PIHAK KEDUA** berhak untuk:
  - a. menentukan dan menetapkan ketentuan atau skema pelaksanaan kerja sama;
  - b. menentukan dan menetapkan jenis kegiatan yang dikerjasamakan;
  - c. memilah data dan informasi yang dapat dibagikan dengan **PIHAK KESATU**; dan
  - d. mengundang perwakilan **PIHAK KESATU** untuk hadir atau berkontribusi pada agenda kegiatan yang diadakan oleh **PIHAK KEDUA**.

Paraf Pihak Kesatu  
Paraf Pihak Kedua



4. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:  
**PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk melakukan dokumentasi atas setiap kegiatan kerja sama yang dilakukan dengan **PIHAK KESATU**.

#### **PASAL 5 JANGKA WAKTU PERJANJIAN**

1. **PERJANJIAN** ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
2. **PIHAK** yang bermaksud memperpanjang jangka waktu **PERJANJIAN** wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum masa berlaku **PERJANJIAN** ini berakhir.
3. Apabila salah satu **PIHAK** bermaksud untuk mengakhiri **PERJANJIAN** sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, **PIHAK** tersebut harus menyampaikan terlebih dahulu pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum rencana pengakhiran.
4. Dengan mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, **PARA PIHAK** bersepakat bahwa **PERJANJIAN** berakhir dalam hal:
  - a. jangka waktu berakhir;
  - b. tidak ada **PIHAK** yang memperpanjang **PERJANJIAN** sebagaimana dimaksud dalam ayat (2); atau
  - c. salah satu **PIHAK** melanggar ketentuan dari **PERJANJIAN** ini.

#### **PASAL 7 BIAYA KEGIATAN**

Biaya kegiatan dari pelaksanaan **PERJANJIAN** ini dibebankan kepada masing-masing **PIHAK** sesuai dengan beban dan tanggungjawab **PARA PIHAK**.

#### **PASAL 9 MONITORING DAN EVALUASI**

1. Masing-masing **PIHAK** baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama akan melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan **PERJANJIAN** ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu sesuai kesepakatan.
2. Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ~~ini~~ akan digunakan oleh **PARA PIHAK** sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

Paraf Pihak Kesatu  
Paraf Pihak Kedua



**PASAL 10**  
**KORESPONDENSI**

Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya sehubungan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini ditujukan ke alamat sebagai berikut :

**PIHAK KESATU :**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Malang  
Alamat : Jalan Semarang 5 Kota Malang  
Telepon : (0341) 551312  
Surel : dekan.fe@um.ac.id

**PIHAK KEDUA :**

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Madya Cukai Malang  
Alamat : Jalan Surabaya 2 Kota Malang  
Telepon : (0341) 551628  
Surel : bcmalang@customs.go.id

**PARA PIHAK** menunjuk petugas sebagai narahubung untuk koordinasi dalam pelaksanaan kerjasama dan menyampaikan pemberitahuan kepada **PIHAK** lainnya; dan

**PIHAK KESATU** memberikan informasi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan dalam penyelenggaraan kerjasama riset, publikasi, edukasi dan literasi, Kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dan pengembangan kapasitas dalam bidang ekonomi dan perdagangan sebagai upaya pengembangan dan pemberdayaan UMKM berorientasi ekspor kepada **PIHAK KEDUA**.

**PASAL 11**  
**KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)**

1. **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya dalam **PERJANJIAN** ini yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari **PARA PIHAK**, yang selanjutnya disebut keadaan memaksa (*force majeure*).
2. keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ~~Pasal ini~~ antara lain namun tidak terbatas pada kejadian-kejadian yang terjadi di luar kehendak dan kekuasaan **PARA PIHAK**, termasuk namun tidak terbatas pada terjadinya peristiwa alam seperti pandemi, gempa bumi, angin topan, banjir, tanah longsor, sambaran petir, gunung meletus, kebakaran, huru-hara, terorisme, sabotase, embargo dan pemogokan massal, perang yang dinyatakan oleh pemerintah yang berwenang, yang secara langsung dan material dapat mempengaruhi pelaksanaan kewajiban **PARA PIHAK** berdasarkan **PERJANJIAN** ini.
3. **PIHAK** yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) wajib memberitahukan **PIHAK** lainnya secara lisan dalam waktu 48 (empat puluh delapan) jam sejak terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*) dan ditindaklanjuti dengan pemberitahuan secara tertulis paling lambat dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak keadaan memaksa (*force majeure*) tersebut terjadi dengan disertai dengan bukti yang layak dan perkiraan atau upaya yang akan atau telah dilakukan untuk mengatasi keadaan memaksa (*force majeure*) tersebut.

Paraf Pihak Kesatu  
Paraf Pihak Kedua



4. Apabila **PIHAK** yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) tersebut lalai untuk memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), maka seluruh kerugian, risiko dan konsekuensi yang mungkin timbul menjadi beban dan tanggung jawab **PIHAK** yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) tersebut.
5. Apabila benar telah terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) dengan bukti-bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan segala hak dan kewajiban yang seharusnya dilaksanakan secara musyawarah.
6. Segala kerugian dan biaya yang dikeluarkan salah satu **PIHAK** sebagai akibat keadaan memaksa (*force majeure*) dalam pelaksanaan **PERJANJIAN Kerja Sama** ini tidak menjadi tanggung jawab **PIHAK** lainnya.

## **PASAL 12 PERSELISIHAN**

1. Apabila dalam pelaksanaan **PERJANJIAN** ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
2. Apabila ketentuan pada ayat (1) tidak tercapai maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul melalui fasilitasi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **PASAL 13 PERUBAHAN ATAU ADENDUM**

1. **PERJANJIAN** dapat dilakukan perubahan/adendum berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
2. Setiap perubahan/adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini akan diatur secara tertulis yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari **PERJANJIAN** ini.

## **PASAL 14 KETENTUAN PENUTUP**

1. Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam **Perjanjian** ini akan dibicarakan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu adendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **PERJANJIAN** ini.
2. **PERJANJIAN** ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK**, serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.
3. **PARA PIHAK** wajib menyampaikan kopi **PERJANJIAN** ini kepada bagian-bagian terkait di instansi masing-masing.

Paraf Pihak Kesatu  
Paraf Pihak Kedua



**PIHAK KESATU**  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Negeri Malang



**Hadi Sumarsono**  
NIP 197003192005011001

**PIHAK KEDUA**  
Kepala Kantor Wilayah Direktorat  
Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur II



**Agus Sudarmadi**  
NIP 196708211991031002

Paraf Pihak Kesatu  
Paraf Pihak Kedua

